



**SUMBER BERITA**

**KAMIS 12 APRIL 2018**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Penerima Dana BK Kota Bisa Dipidana

**RBI, BENGKULU** - Penerima dana Beban Kerja (BK) tahun 2015 lalu kalau tidak mau dipidana agar uang yang diterima tersebut segera dikembalikan. Sebab kasus dugaan penyimpangan dana Beban Kerja (BK) senilai Rp 500 juta pada DPPKAD Kota Bengkulu, tahun 2015 lalu itu mulai menandai titik terang. Sebab, sekarang ini untuk melanjutkan kasus tersebut tim Penyidik Kejari Bengkulu tinggal menunggu hasil audit BPKP untuk menentukan sikap dalam penanganan kasus tersebut. "Untuk kasus dana BK DPPKAD ini sudah hampir lengkap. Cuma kita masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP. Setelah itu nanti baru kita mengambil atau menentukan sikap apakah kasus itu ada kerugian negara atau tidak, dan apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak," ucap Kajari Bengkulu, I Made Sudarmawan SH, MH Rabu, (11/4).

Dikatakan, sesuai dengan proses Penyidikan sejauh ini, ada sekitar 15 orang yang menerima dana BK itu, dan sesuai dengan laporan terakhir 15 orang itu sudah mengembalikannya. Sebab, sejauh ini pengucuran dana BK itu disinyalir menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal). Mereka yang menerima dana itu dan tidak

mengembalikan, tentu ada konsekuensinya, dan tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa dipidana.

"Ya, memang kita juga mengimbau kepada semua orang yang menerima kelebihan dana BK itu, agar untuk segera dikembalikan sebelum terlambat. Sekarang ini baru 15 orang mengembalikannya. Mereka yang tidak mengembalikan berarti mereka ikut menikmati uang yang tidak sah, dan menikmati uang hasil dari tindak pidana," tandasnya.

Diakuinya, segala kemungkinan setiap proses tahapan Penyidikan dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut sudah dilakukan dengan maksimal. Demikian juga untuk memastikan tanda tangan penerima uang Rp 500 juta itu juga sudah dilakukan.

"Uji forensik salah satu tanda tangan orang yang diduga menerima dana itu sudah kita lakukan. Sebenarnya forensik itu untuk menentukan identik atau tidak, dengan artian untuk menentukan apakah orang itu terkait atau tidak. Bukan penentuan tindak pidana, kalau tindak pidananya sudah jelas, sekarang ini tinggal menunggu hasil kerugian negara, kalau hasil kerugian negara sudah ada, maka kasus ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya," demikian tutup dia. (ide)